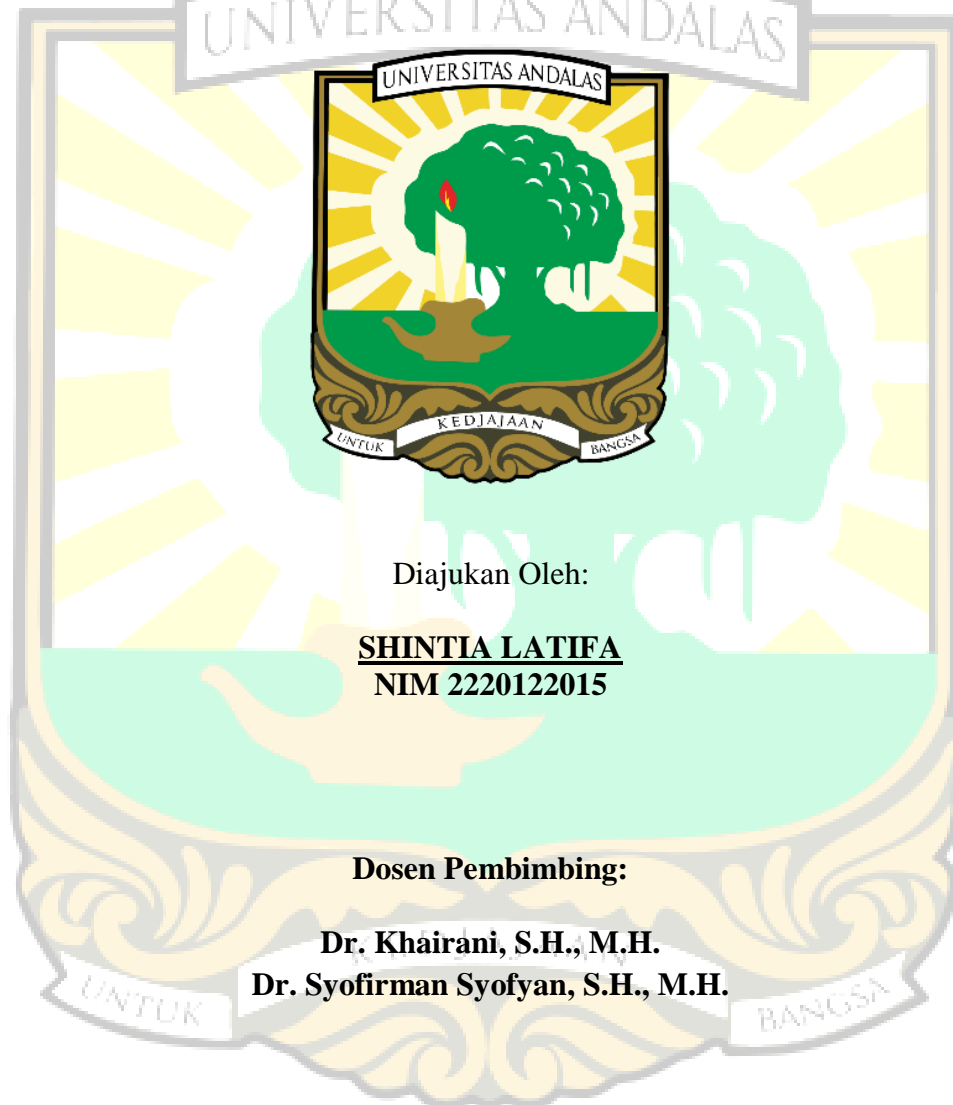


TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR
PASAL 16 AYAT 1 HURUF (a) UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS (STUDI KASUS DIKOTA PADANG)**

*Diajukan guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan Pada Fakultas Hukum*

Universitas Andalas



Diajukan Oleh:

SHINTIA LATIFA
NIM 2220122015

Dosen Pembimbing:

Dr. Khairani, S.H., M.H.
Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR PASAL 16 AYAT 1 HURUF (a) UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS DIKOTA PADANG)

(Shintia Latifa, 2220122015, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang)

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap Notaris yang melanggar UUJN dilakukan demi melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan Notaris sesuai dengan aturan yang berlaku, agar menghindari Notaris yang tidak bertanggungjawab dan tidak mentaati serta menjalankan jabatannya. Di Kota Padang pada Tahun 2023 terdapat Notaris yang diberikan sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini: 1) Bagaimana Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Notaris, 2) Apa Akibat Hukum Dari Tindakan Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, 3) Bagaimana Penegakan Hukum Oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris merupakan penelitian yang memperoleh data langsung dan masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara. Berdasarkan penelitian penulis menemukan bahwa; 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris dilakukan secara *preventif* dan *kuratif*, Pengawasan terhadap Notaris yang dilaporkan karena adanya pelanggaran terhadap jabatannya bersifat pengawasan *kuratif*, pengawasan setelah terjadinya dugaan pelanggaran dengan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Notaris atas adanya laporan dan pemberian teguran. 2) Akibat hukum dari tindakan Notaris H yang melanggar Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN diberikan sanksi administratif yaitu pemberhentian sementara dari pelaksanaan jabatan Notaris tersebut bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap dan Notaris harus melaksanakan putusan tersebut dan kehilangan kewenangan dalam melaksanakan jabatan Notaris. 3) Penegakan hukum terhadap Notaris dilakukan oleh MPN secara berjenjang dari MPD, MPW dan MPP, bahwa tindakan yang dilakukan H yang tidak menjalankan sanksi yang diberikan oleh MPP dan tidak melakukan serah terima protokol Notaris, dalam hal ini MPN tidak bisa mengeksekusi protokol tersebut dan upaya yang dilakukan hanya memberikan teguran. Seharusnya MPN diberi kewenangan untuk melakukan eksekusi protokol tersebut untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap praktik Notaris yang bersangkutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Notaris, Majelis Pengawas Notaris

**LAW ENFORCEMENT AGAINST NOTARIES WHO VIOLATE ARTICLE 16
PARAGRAPH 1 LETTER (a) OF THE NOTARIES OFFICE LAW (CASE
STUDY IN PADANG CITY)**

*(Shintia Latifa, 2220122015, Notarial Master Program, Faculty Of Law,
Postgraduate Andalas University)*

ABSTRACT

Law enforcement against Notaries who violate the UUJN is carried out in order to protect the interests of the general public and ensure the implementation of the Notary's office in accordance with applicable regulations, in order to avoid Notaries who are irresponsible and do not obey and carry out their office. In Padang City in 2023 there was a Notary who was given a sanction of temporary dismissal from the Notary's position who violated the provisions of Article 16 Paragraph (1) letter a of the UUJN. Based on this, the author is interested in conducting further research. The formulation of the problem in this study: 1) How is the Supervision of the Implementation of Notary Duties, 2) What are the Legal Consequences of Notary Actions that Violate the Notary Law, 2) How is the Law Enforcement by the Notary Supervisory Board Against Notaries Who Violate the Notary Law. The problem approach method used in this study is the empirical legal method, which is a study that obtains direct data and the community as the first source through field research, which is carried out either through observation, interviews. Based on the research, the author found that; 1) Supervision of the implementation of Notary duties is carried out preventively and curatively, Supervision of Notaries who are reported due to violations of their positions is of a curative nature, supervision after the occurrence of alleged violations by summoning and examining Notaries for reports and giving warnings. 2) The legal consequences of the actions of Notary H who violated Article 16 Paragraph (1) letter a of the UUJN are given administrative sanctions, namely temporary suspension from carrying out the Notary's position, which is binding and has permanent legal force and the Notary must implement the decision and cannot make authentic deeds. 3) Law enforcement against Notaries who are given temporary suspension sanctions is carried out by the MPN in stages from the MPD, MPW and MPP, that the actions taken by H who do not protect the interests of the related parties in legal acts, thus causing losses to the parties and the actions he has carried out will be subject to sanctions, because sanctions are given as a form of protection and law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Notary, Notary Supervisory Board